

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi Indonesia yang berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1°– 4° Lintang Utara dan 98°– 100° Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan provinsi Aceh, sebelah timur dengan negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Riau dan Sumatera Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas daratan provinsi Sumatera Utara yaitu 71.680,68 km², sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil di pulau Nias, pulau-pulau batu, serta beberapa pulau kecil, baik itu di bagian barat maupun di bagian timur pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar yaitu Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.620,70 km², atau sekitar 9,23% dari seluruh total luas Sumatera Utara atau 8,74%, kemudian Kabupaten Langkat dengan luas 6.263,29 km². Sedangkan luas daerah terkecil yaitu Kota Sibolga dengan luas 10,77 km² atau sekitar 0,02% dari total luas wilayah Sumatera Utara.

Secara administratif, Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 Kabupaten dan 8 Kota, Administrasi pemerintahan Kabupaten dan Kota ini terdiri atas 325 Kecamatan dan 5456 Desa/Kelurahan. Pusat pemerintah Sumatera Utara terletak di Kota Medan, Pada tahun 2015 berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sensus 2016 adalah 14.102.911 jiwa. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Medan (2,229.408 jiwa), Kabupaten Deli Serdang (2,072,521 jiwa), dan Kabupaten Langkat (1,021,208 jiwa). Berikut ini 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Asahan	19	Kabupaten Samosir
2	Kabupaten Batu Bara	20	Kabupaten Serdang Bedagai
3	Kabupaten Dairi	21	Kabupaten Simalungun
4	Kabupaten Deli Serdang	22	Kabupaten Tapanuli Selatan
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	23	Kabupaten Tapanuli Tengah
6	Kabupaten Karo	24	Kabupaten Tapanuli Utara
7	Kabupaten Labuhanbatu	25	Kabupaten Toba Samosir
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	26	Kota Binjai
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	27	Kota Gunungsitoli
10	Kabupaten Langkat	28	Kota Medan
11	Kabupaten Mandaling Natal	29	Kota Padangsidempuan
12	Kabupaten Nias	30	Kota Pematangsiantar
13	Kabupaten Nias Barat	31	Kota Sibolga
14	Kabupaten Nias Selatan	32	Kota Tanjungbalai
15	Kabupaten Nias Utara	33	Kota Tebing Tinggi
16	Kabupaten Padang Lawas		

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
17	Kabupaten Padang Lawas Utara		
18	Kabupaten Pakpak Bharat		

4.2 Analisis Data

4.2.1 Pengujian Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan proses mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul untuk membuat kesimpulan secara umum. Gambaran statistik dari masing-masing variabel dalam penelitian disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
(dalam jutaan rupiah)**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	99	6.910,00	1.535.310,00	116.307,7172	254.876,69350
DAU	99	279.675,00	1.611.941,00	611.344,9596	280.722,67940
DAK	99	,00	408.339,00	106.735,6768	76.190,98425
DBH	99	,00	955.710,00	67.241,8485	131.409,07510
BM	99	102.211,00	936.599,00	237.461,3232	148.556,86920
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Output SPSS 22, data diolah 2018

1. Berdasarkan tabel hasil pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan jumlah sampel (N) sebanyak 99, dimana rata-rata jumlah Belanja Modal (BM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sebanyak 237.461,3232 dengan jumlah Belanja Modal (BM) terendah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah

pada tahun 2014 sebesar Rp. 102.210.555.843, dan tertinggi adalah Kota Medan pada tahun 2016 sebesar Rp. 936.599.131.961, Dengan standar deviasi 148.556,86.

2. Berdasarkan data diatas rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sebanyak 116.307,7172 dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah adalah Kabupaten Nias Utara tahun 2014 sebesar Rp 6.910.477.964 dan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi adalah Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp1.535.309.574.014 dengan standar devisiasi 254.876,69.
3. Berdasarkan data diatas rata-rata jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sebanyak 611.344,95 dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) terendah adalah Kabupaten Nias Barat tahun 2014 sebesar Rp 279.674.672.000 dan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi adalah Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp 1.611.940.995.000 dengan standar devisiasi 280.722,67.
4. Berdasarkan data diatas rata-rata jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara sebanyak 106.735,67. Adapun Kota Medan dan Kabupaten Nias Barat pada tahun 2015 tidak memiliki Dana Alokasi Khusus dan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang tahun 2016 sebesar Rp 408.339.324.652 dengan standar devisiasi 76.190,98.
5. Berdasarkan data diatas rata-rata jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sebanyak 67.241,84. Adapun Kabupaten

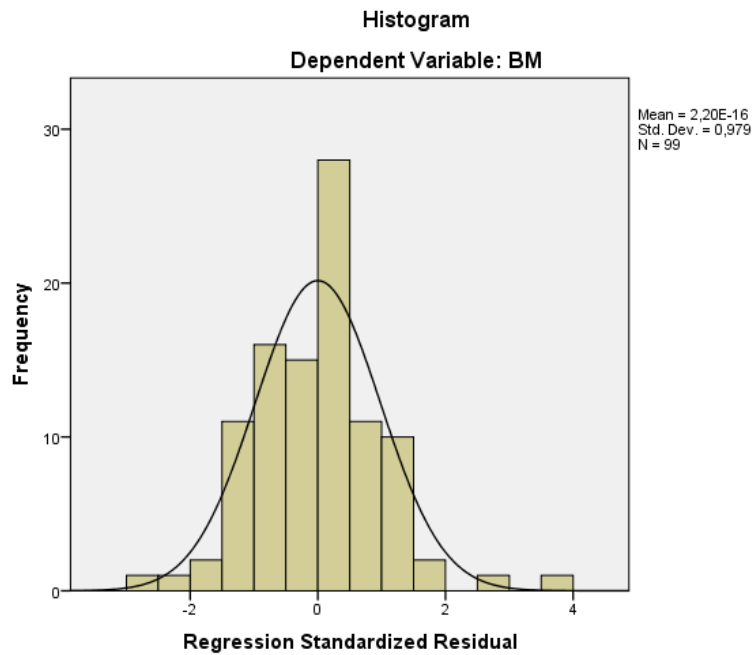
Labuhan Batu, Kabupaten Nias Barat tahun 2015 dan Kabupaten Simalungun tahun 2016 tidak memiliki Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) tertinggi adalah Kabupaten Medan tahun 2015 sebesar Rp 955.710.023.263 dengan standar deviasi 131.409,07.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan hasil regresi yang bisa di pertanggungjawabkan dan tidak bias atau *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dari pengujian tersebut yaitu Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk dapat menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2016:154). Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang mempunyai distribusi normal. Berikut adalah hasil dari Uji Normalitas bisa dilihat pada gambar :



Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Pada gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa data atau variabel berdistribusi normal hal ini ditunjukkan pada distribusi data yang tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri.

Selain itu hasil uji normalitas dengan menggunakan uji nonparametik *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov

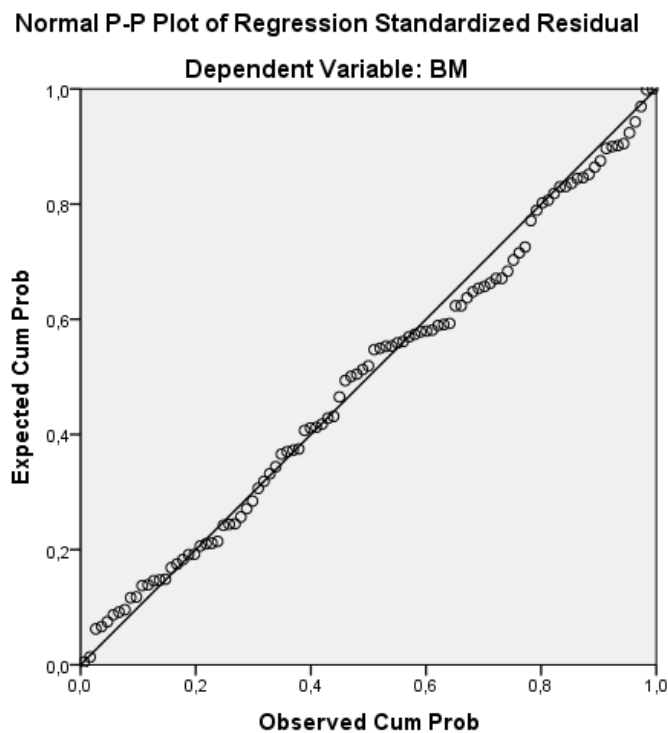
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	55474,83586000
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,043
Test Statistic		,063

Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance	

Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *asymp.sig. (2-tailed)* adalah $0,200 < 0,05$, hal ini juga menunjukkan bahwa dalam penelitian ini data yang digunakan berdistribusi secara normal.

Dan untuk uji normalitas dengan menggunakan grafik normal probability plot adalah sebagai berikut:



Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal probability plot di atas terlihat bahwa titik-titik atau data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini berarti bahwa data berdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik yaitu regresi yang bebas dari Autokorelasi (Ghozali, 2016)

Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mendeteksi autokorelasi dengan patokan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hipotesis Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicion	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicion	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Berikut ini hasil pengujian Durbin Watson terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,928 ^a	,861	,855	56642,85523	2,088
a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, PAD					
b. Dependent Variable: BM					

Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

Dari hasil pengolahan data di atas menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson sebesar 2,088. Nilai ini dibandingkan nilai tabel dengan menggunakan nilai sinifikansi 5%, jumlah sampel 99 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka ditabel Durbin Watson akan di dapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 4.6 Tabel Durbin Watson

	K = 4	
N	D1	Du
15	0,69	1,97
-	-	-
-	-	-
99	1,59	1,76

Oleh karena itu nilai D-W 2,088 lebih besar dari batas du 1,76 dan kujrang dari $4 - 1,76$ ($4-du$) , maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat Autokorelasi positif maupun negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4.2.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolonieritas diperlukan untuk dapat mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kesamaan dengan variabel independen lain dalam satu model. Berikut hasil dari Uji Multikolinieritas bisa dilihat pada tabel :

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Constant	73897,031	16121,664		4,584	,000		
	PAD	,203	,065	,348	3,140	,002	,121	8,261
	DAU	,137	,034	,258	4,019	,000	,359	2,789
	DAK	,264	,090	,135	2,926	,004	,695	1,439
	DBH	,420	,115	,371	3,664	,000	,144	6,928

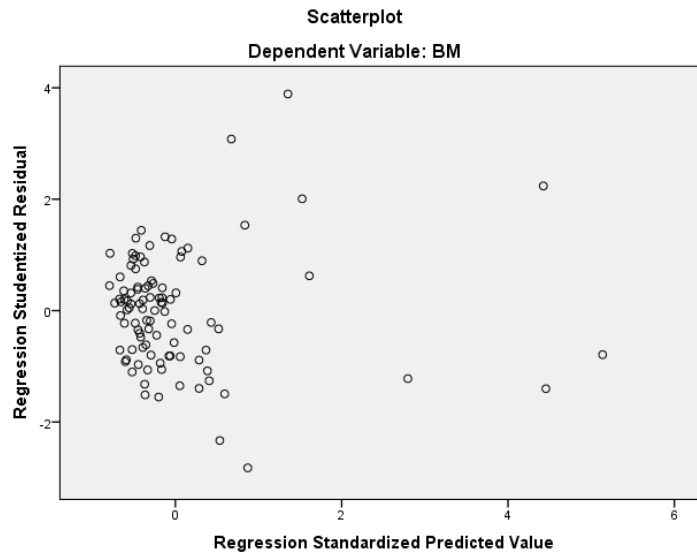
a. Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel hasil pengujian multikolinieritas pada tabel coefficients menunjukkan, tidak terdapat satu variabel yang mempunyai nilai VIF > 10. Dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala Multikolinieritas anatar variabel independen dalam model regresi.

4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk dapat menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Berikut adalah hasil dari Heterokedastisitas bisa dilihat pada tabel :



Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar dengan baik diatas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas pada model regresi.

4.2.3 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	73.897,031	16121,664		4,584	,000
	PAD	,203	,065	,348	3,140	,002
	DAU	,137	,034	,258	4,019	,000
	DAK	,264	,090	,135	2,926	,004
	DBH	,420	,115	,371	3,664	,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 73.897,031 + 0,203 \text{ PAD} + 0,137 \text{ DAU} + 0,264 \text{ DAK} + 0,420 \text{ DBH}$$

Dari persamaan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai konstant adalah 73.897,031 artinya apabila nilai variable Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana bagi Hasil bernilai nol, maka Belanja Modal sebesar 73.897,031.
2. Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,203 artinya apabila terjadi perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,203.
3. Koefisien regresi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,137 artinya apabila terjadi perubahan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1%, maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,137.
4. Koefisien regresi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,264 artinya apabila terjadi perubahan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1%, maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,264.
5. Koefisien regresi untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sebesar 0,420 artinya apabila terjadi perubahan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 1%, maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,420.

Berdasarkan persamaan diketahui bahwa DBH mempunyai pengaruh paling dominan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, karena koefisien regresi (beta) untuk DBH lebih besar dibandingkan koefisien regresi (beta) pada Pendapatan Asli Dearah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus.

4.2.4 Uji Hipotesis

Secara statistik, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual bisa diukur dengan nilai statistik t, nilai statistik f, serta koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4.3.4.1 Pengujian Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian parsial digunakan uji t. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat kepercayaan 5%. Berikut hasil dari Uji Statistik t bisa dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Constant	73897,031	16121,664		4,584	,000		
	PAD	,203	,065	,348	3,140	,002	,121	8,261
	DAU	,137	,034	,258	4,019	,000	,359	2,789
	DAK	,264	,090	,135	2,926	,004	,695	1,439
	DBH	,420	,115	,371	3,664	,000	,144	6,928

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai t *hitung* sebesar 3,140 sedangkan nilai t table dengan perhitungan $df = n - k = 99 - 4 = 95$ sebesar 1,6611 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) 0,002 lebih kecil dari taraf

signifikansi 0.05. maka H_1 dapat diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 4,019 sedangkan nilai t_{tabel} dengan perhitungan $df = n - k = 99 - 4 = 95$ sebesar 1,6611 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 0,000 lebih kecil dari tarif signifikansi 0.05. maka H_1 dapat diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2,296 sedangkan nilai t_{tabel} dengan perhitungan $df = n - k = 99 - 4 = 95$ sebesar 1,6611 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,004 lebih kecil dari tarif signifikansi 0.05. maka H_1 dapat diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara
4. Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 3,664 sedangkan nilai t_{tabel} dengan perhitungan $df = n - k = 99 - 4 = 95$ sebesar 1.6611 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikansi untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) 0,002 lebih kecil dari tarif signifikansi 0.000. maka H_1 dapat diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara

4.3.4.2 Pengujian Simultan (Uji Statistik f)

Pengujian ini bertujuan agar dapat menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan di model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari Pengujian Simultan (Uji Statistik f) bisa dilihat pada tabel :

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji Statistik f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1861185224000,00	4	465296306000,000	145,024	,000 ^b
	Residual	301590826500,00	94	3208413048,000		
	Total	2162776051000,00	98			
a. Dependent Variable: BM						
b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, PAD						

Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($145,024 > 2,47$) yang berarti bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$. Nilai sig F sebesar 0,000 sedangkan untuk tingkat signifikannya adalah 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai sig F lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan. Maka Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal,

4.3.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Berikut adalah hasil dari Koefisien Determinasi bisa dilihat pada tabel :

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,928 ^a	,861	,855	56642,85523
a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, PAD				
b. Dependent Variable: BM				

Sumber : Output SPSS 22, Data Diolah 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R sebesar 0,855 yang berarti bahwa 85,5%, Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan untuk sisanya sebesar 14,5% kemungkinan dipengaruhi pada variabel lain diluar penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja

Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai *t hitung* sebesar 3,140 sedangkan nilai *t tabel* dengan perhitungan $df = n - k = 99 - 4 = 95$ sebesar 1,6611 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) 0,002 lebih kecil dari tarif signifikansi 0.05. maka H_1 dapat diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dapat diukur melalui besarnya

target Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi serta Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, semakin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan semua total pendapatan semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah (Susanti, 2016). Dengan demikian apabila pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka Pengalokasian Belanja Modal juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini semakin memperkuat hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan (Nuarisa, 2013), (Pelealu, 2013), (Megawati, 2013), (Mayasari, 2014), dan (santoso, 2013), dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai *t hitung* sebesar 4,019 sedangkan nilai *t tabel* dengan perhitungan $df = n - k = 99 - 4 = 95$ sebesar 1,6611 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 0,000 lebih kecil dari tarif signifikansi 0.05. maka H_1 dapat diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini mengindikasikan terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik

menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga kemungkinan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*, Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengutamakan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya agar bisa membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik (Mayasari, 2014). Dengan demikian apabila pemerintah Daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara memperoleh Dana Alokasi Umum meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.

Hasil penelitian ini semakin memperkuat hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan (Susanti, 2016), (Pradana, 2017), (Mayasari, 2014) dan (Nuarisa, 2013) dimana Dana Alokasi Umum (DAU) selalu berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai *t hitung* sebesar 2,296 sedangkan nilai *t tabel* dengan perhitungan $df = n - k = 99 - 4 = 95$ sebesar 1,6611 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,004 lebih kecil dari tarif signifikansi 0.05. maka H_1 dapat diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing kabupaten/kota bisa dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan bisa mempengaruhi pengalokasian belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Pradana, 2017).

Hasil penelitian ini semakin memperkuat hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Pealeu, 2013), (Nuarisa, 2015) dan (Pradana, 2017). dimana Dana alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap

pengalokasian belanja modal.

4.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai nilai *t hitung* sebesar 3,664 sedangkan nilai *t tabel* dengan perhitungan $df = n - k = 99 - 4 = 95$ sebesar 1.6611 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikansi untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) 0,002 lebih kecil dari tarif signifikansi 0.000. maka H_1 dapat diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakuakn dengan prodentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND).

Sedangkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wandira, 2013). Dengan demikian apabila pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang tinggi maka Pengalokasian Anggaran Belanja Modal juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini semakin memperkuat hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Wandira, 2013) dan (Susanti, 2016). dimana Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.